

---

# PEMIKIRAN POLITIK NICCOLO MACHIAVELLI DAN POLITIK ISLAM (Sebuah Studi Perbandingan)

M. Syamsudini  
*Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Jember*

## ABSTRACT

This study tried to compare the political concept of Niccolo Machiavelli with Islamic political concept. The problem of the research is: how is the conceptual comparison between Machiavelli's politic with Islamic one?. Specifically, how is the political concept of Machiavelli?. how is the political concept of Islam?. and how is the comparison between those two concepts?

This is a qualitative study involving library research. The data sources are written documents or library material consisting of political thought of Niccolo Machiavelli and Islamic political concept. The data were analyzed with content and comparative analysis.

The result showed that there is an agreement between the two concepts that constitutes a political bargaining between each other using tolerance language. the tolerance doesn't mean that Islam gives religious legitimation to the political thought of Machiavelli and apologically defense it all out. It is expected that the final result of this study can be examined more deeply by other researchers in order to enrich more progressive scientific treasure.

**Kata kunci:** pemikiran, politik, Machiavelli dan Islam

Sejarah kekuasaan, yang telah mewarnai wajah perpolitikan negara-negara di dunia, tidak bisa lepas dari adanya ide sekulerisme politik yang ditawarkan oleh seorang politikus ulung Italia Nicolo Machiavelli. Bahkan pemikiran Machiavelli hampir selama empat belas abad terakhir ini telah mengakar dan mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang ditetapkan oleh seorang penguasa. Menyangkut pemikiran Machiavelli Downs pernah menyatakan:

Kesan awal yang ditangkap dari pandangan dunia mengenai pemikiran Machivelli ini adalah pemikiran ini sama artinya dengan sesuatu yang condong pada iblis, kejam, busuk dan jahat. Dan asal mula kesan ini menjadi isu intemasional adalah karena Niccolo Machiavelli dijadikan sebuah lambang yang populer buat politikus yang suka menghasut, licik, hipokrit, tak kenal moral, tak mengenal prinsip kebenaran

dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. (Downs, 2001: 21)

Dari keterangan di atas tampak bahwa reputasi Machiavelli sebagai tokoh yang menyeramkan boleh dikatakan bersumber dari pengalaman-pengalamannya di dalam memberikan analisa terhadap beberapa kejadian politik yang terjadi di Italia. Dan hasil analisisnya itu pada akhir abad ke-19 telah menjadi sebuah wacana yang pada akhirnya diapresiasi sebagai landasan politik praktis oleh beberapa negara di dunia.

Isu sentral yang dikembangkan Machiavelli dalam menganalisa kejadian politik adalah bahwa kepala negara harus menjaga stabilitas dan efektivitas penyelenggaraan negara. Dengan efektivitas dan stabilitas itu akan membuat program pemerintahan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu seorang kepala negara harus menggunakan wewenang atau otoritasnya secara baik, yang direalisasikan

dalam bentuk strategi politik yang menguntungkan negara.

Perbedaan konsep Nicolo Machiavelli ini menjadi sangat menarik, terutama ketika ada beberapa konsep yang bersinggungan dengan agama yang terkesan kontroversial. Salah satu konsep yang dianggap kontroversial di kalangan agama adalah adanya konsep penisahan antara kekuasaan (Negara) dan agama, yang pada intinya menolak Negara berbentuk teokrasi. Hal seperti ini tampak begitu jelas ketika Machiavelli menentang keras pemerintahan Girolamo Savoranola (salah seorang peminipin biara Dominican yang menjadi kepala pemerintahan yang berkuasa di negeri Florence, Italia) yang landasan politiknya bernuansa moralitas-relegius. Kartodirdjo (1986-36) menjelaskan:

Keseriusan Machiavelli dalam penentangannya terhadap Savoranola dikarenakan adanya eksploitasi nilai-nilai agama dalam politik negara. Girolamo Savoranola dan para pendukungnya mengadakan gerakan *monastisisme* dengan cara mendirikan biara-biara untuk menumbuhkan semangat *asketisme* (gerakan melupakan diri, suatu pengorbanan sebagai sarana penyempurnaan diri sebagai syarat memasuki kebahagiaan di alam baka), hal ini menurut Savoranola dirasakan mulai memudar dan harus menjadi pembendung gerakan sekularitas yang melanda penduduk kota-kota yang semakin bertambah kaya dan bertambah makmur, yang dipelopori oleh para seniman, pedagang, pengusaha dan para penguasa sebagai pembesar-pembesar kota (*city boss*).

Sedangkan konsep politik dalam pandangan syari'at Islam, dapat berangkat dari pertanyaan yang *concern* dengan masalah yang tengah dikaji, yaitu adakah sistem politik dalam Islam? Terhadap persoalan ini, setidaknya ada tiga macam tawaran jawaban:

*Pendapat pertama*, antara lain didukung oleh al-Mawardi, al-Ghazali, Ibnu Taimiyah (dari kalangan ulama' salaf) dan Rasyid Ridla, Abu 'Ala al-Maududi,

Taqiyuddin al-Nabhani, Sayyid Qutb dan Hasan al-Banna (dari kalangan ulama mutaakhirin). Mereka berpandangan bahwa sistem politik dalam Islam bukan saja ada, tetapi malah sudah menjadi "*ma'lumun min al-dini bi al-dlarurah*" (sesuatu yang sudah diketahui dengan jelas dan amat penting keberadaannya), sebagaimana halnya adanya kewajiban shalat, zakat, puasa, haji, jihad dan lain sebagainya. Oleh karena itu mempertanyakan ada-tidaknya sistem politik dalam Islam sama dengan mempertanyakan perlu-tidaknya makanan bagi manusia. Bukan saja keberadaan sistem politik itu telah ada, bahkan bentuk dan rincian sistem politiknya pun (seperti pola kekuasaan, mekanisme suksesi, pertanggungjawaban penguasa, hak warga negara dan sebagainya) sudah begitu jelas.

Sementara Nasution (1979: 101), dengan mengutip pendapat Ali Abd. al-Raziq dan Thaha Husen, menyatakan bahwa agama Islam, sebagaimana dalam pengertian Barat, tidak mempunyai dan tidak mendoktrinkan sedikitpun tentang sistem politik. Bagi Ali Abd. al-Raziq, Islam merupakan sebuah agama yang semata-mata hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Inilah pandangan yang merepresentasikan *pendapat kedua*

Dan lebih Jauh Yusanto (1998: 77) menyatakan sebagai berikut.

*Pendapat ketiga*, sebagaimana dinyatakan oleh Yusanto (1998: 77), pada intinya menolak pandangan kedua tetapi juga tidak terlalu setuju dengan pendapat pertama. Bagi mereka Islam adalah agama yang lengkap dan paripurna, mengatur segala aspek kehidupan manusia, tentu termasuk masalah politik. Islam bagi kelompok ketiga ini bukanlah agama sebagaimana dimengerti oleh orang-orang Barat yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Akan tetapi Islam baginya jelas-jelas mempunyai sistem politik, hanya saja penjelasan tentangnya dalam wahyu sebatas garis besar atau pokok-pokok dan subtansinya saja, sedang rincian dan operasionalnya di lapangan diserahkan

kepada manusia sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

## **METODE PENELITIAN**

### **Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah konsep pemikiran politik Machiavelli dan konsep politik Islam, yang selanjutnya dicari titik temunya guna pembentukan paradigma baru tentang konsepsi politik Machiavelli yang bernuansa Islam dan atau konsepsi Islam tentang politik yang bernuansa Niccolo Machiavelli. Dan bagian akhir akan membahas perbedaan prinsip (mendasar) antara keduanya. Ruang lingkup ini merupakan batasan pembahasan agar penelitian ini tidak menjadi menara gading, yaitu penelitian yang mengkaji masalah yang bukan pada proporsinya.

### **Jenis Penelitian**

Studi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu menjadikan bahan-bahan pustaka atau dokumen-dokumen tertulis sebagai sumber data. Sedangkan teori penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dasar yang dikenal dalam penelitian sebagai *grounded theory*. Shonhadji (2000: 9) menjelaskan:

*Grounded theory* ini merupakan pengembangan dari deskripsi terhadap gejala-gejala di lapangan dan sebagai konsekuensi dari paradigma naturalistik yang mempercayai adanya realitas ganda dan ketergantungan terhadap faktor-faktor kontekstual. Arah pengembangan teori ini nampak pada saat peneliti mengumpulkan data dan menggunakan sejumlah waktu dengan subyek penelitian. Proses analisis datanya oleh Bogdan dan Biklen (1982) dilukiskan sebagai suatu corong, pada bagian awal terbuka dan sangat luas dan bagian akhirnya lebih terarah dan spesifik.

Atas dasar teori di atas, penelitian ini akan mengarahkan pada hal-hal yang lebih spesifik: diawali dari teori dasar tentang konsep pemikiran politik Niccolo Machiavelli dan konsep politik Islam, kemudian dari kedua konsep ini dicari titik

temu dalam rangka pencarian dan pembentukan paradigma baru tentang konsepsi politik Islam bernuansa Machiavelli dan atau konsepsi pemikiran politik Machiavelli bernuansa Islam.

### **Sifat Penelitian**

Sifat dari penelitian ini adalah *diskriptif-analisis-eksplanatoris*. Dengan demikian penelitian ini berusaha memaparkan atau mendeskripsikan bangunan pemikiran politik Niccolo Machiavelli dan konsep politik Islam yang kemudian terhadap keduanya itu dilakukan analisis dengan interpretasi tentang substansi kedua konsep pemikiran ini dengan membangun beberapa korelasi yang dianggap signifikan. Nazir (1985: 63) menjelaskan:

Metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, obyek, sistem, pemikiran, kelas atau peristiwa zaman sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang di selidiki. Dari uraian penjelasan di atas, penelitian ini dapat menemukan sebuah paradigma baru yang merupakan gabungan dari dua konsep pemikiran politik yaitu antara Machiavelli dan syari'at Islam.

### **Pengumpulan Data (Sumber Data)**

Sesuai dengan karakter *library research* (penelitian kepustakaan) yang menjadikan bahan-bahan pustaka atau dokumen tertulis sebagai sumber data, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi documenter atau telaah naskah.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan atas:

1. Sumber primer, yaitu karya-karya tulisan yang mengkaji tentang pemikiran politik Niccolo Machiavelli dan kajian Syari'at Islam tentang politik.
2. Sumber sekunder, yaitu tulisan yang berisi

tentang tantangan, komentar, saran atau kritik terhadap ide pemikiran politik Niccolo Machiavelli dan konsep Islam tentang politik.

#### Analisa Data

Winarno Surahmat (1995: 42) menjelaskan:

Data akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif, induktif dan komparatif. Induksi merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan beberapa data yang bersifat khusus untuk membentuk suatu generalisasi, sedangkan deduksi merupakan langkah analisis data dari bersifat general menuju sebuah spesifikasi. Sementara komparasi merupakan perbandingan data yang telah ditemukan.

Dari penjelasan tentang analisa data di atas, maka langkah akhir dari analisa data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa induktif, namun sebelum memasuki analisa induktif, perlu ditempuh langkah analisa deduktif dan komparasi yang akan lebih menjelaskan dua konsep pemikiran politik ini secara gamblang dan jelas. Teknik analisa data secara induktif ini diawali dengan analisa tema yang memuat tesis, lalu menemukan antitesanya dan terakhir membuat sintesa. Setelah ketiga proses di atas dilaksanakan, maka tahapan selanjutnya adalah menganalisa ulang sumber-sumber data dalam upaya mencapai pada kesimpulan yang integral dan pada akhirnya terbentuklah kristalisasi paradigma baru tentang konsep pemikiran politik Niccolo Machiavelli yang dikolaborasikan dengan konsep Syari'at Islam tentang politik.

#### Prosedur Penelitian

##### a. Pembentukan Data

Pembentukan data yang digunakan dalam penelitian ini, direkam dari berbagai sumber baik literer, artikel, makalah dan sebagainya yang berkaitan dengan konsep pemikiran politik Niccolo Machiavelli dan konsep politik Syari'at Islam.

b. *Unitisasi* Unitisasi dalam penelitian ini, adalah mengklasifikasikan beberapa titik temu dan komparasi kontras antara konsep pemikiran politik Niccolo Machiavelli dan konsep politik Syari'at Islam.

##### c. *Sampling*

Asumsi dasar penggunaan sampel dalam penelitian ini, adalah tidak adanya pengetahuan *apriori* tentang gejala yang menjadi permasalahan. *Sampling* dalam penelitian ini, dilakukan penyeleksian setiap unit dari sebuah daftar tabel ke dalam sampel, setelah menentukan titik permulaannya secara sistematis. Dan sampel yang dihasilkan merefleksikan perbedaan-perbedaan *apriori* dalam daftar tabel.

##### d. *Pencatatan (Recording)*

Pencatatan dalam penelitian ini adalah merekam beberapa literatur yang berkaitan dengan pemikiran politik Machiavelli dan konsep politik Islam yang telah diklasifikasikan.

##### e. *Penarikan Inferensi (Kesimpulan)*

Penarikan inferensi dalam penulisan penelitian ini dilakukan setelah adanya titik temu dan komparasi kontras antara konsep pemikiran Niccolo Machiavelli dan konsep politik Syari'at Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Pemikiran Politik Machiavelli

#### 1. Bentuk Negara

Secara umum terdapat tiga jenis bentuk pemerintahan yang pernah eksis di dunia, yaitu negara kerajaan, republik dan negara gereja. Dan bentuk tiga negara ini telah terekam oleh Niccollo Machiavelli dan bahkan terbukti masih eksis hingga sekarang ini. Negara Kerajaan menurut Machiavelli terdiri dari dua bentuk yaitu kerajaan warisan dan kerajaan baru

#### 2. Strategi Mencapai Kekuasaan

Ada beberapa strategi yang biasa ditempuh oleh seseorang untuk bisa menjadi penguasa. Menurut Benedanto (1999: 51), strategi mencapai suatu kekuasaan, antara

lain, terjadi karena nasib mujur, mengandalkan kemampuan (termasuk senjata), melalui jalur konstitusi pemilihan umum [Pemilu] yang didukung oleh rakyat dan menggunakan cara-cara yang licik dan kejam.

### 3. Strategi Mempertahankan Kekuasaan

Ada beberapa cara yang dilakukan oleh penguasa dalam mempertahankan negaranya, antara lain menggunakan kekuatan angkatan bersenjata tentara, penumpasan habis terhadap penguasa lama, penumpasan terhadap rakyat yang tidak setia, memilih menteri yang loyal, mencegah terjadinya kudeta kekuasaan dan invasi negara musuh yang mau menyerang serta membangun pertahanan di wilayah koloni.

### 4. Sosok Penguasa Yang Di Segani Rakyat

Menurut Machiavelli tipe atau sosok seorang penguasa yang disegani oleh rakyat ada beberapa kriteria, antara lain: penguasa harus kuat dan licik, mengedepankan *virtue* (keutamaan) daripada *fortune* (kemujuran), murah hati, penuh belas kasih, setia memegang janji dan berwibawa serta kharismatik.

### Konsep Islam tentang Politik

Jalinan berkelindan antara agama dan politik dalam bentuknya yang sempurna telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, hingga al-Qur'an mengapresiasi beliau sebagai *uswah hasanah* atau teladan yang baik (QS. 33: 21). Salah satu peristiwa penting dalam hidup beliau adalah hijrah ke Madinah yang dilakukan secara *inter alia* (*perjalanan antara Makkah dan Madinah*). Untuk lebih menjelaskan hubungan antara Islam dan politik, berikut paparan mendetail tentang konsep Islam mengenai politik.

#### 1. Politik dalam Islam

Gambaran pejoratif yang dihasilkan dari konseptualisasi Barat tidak mempunyai relevansi dengan politik yang di konseptualisasikan dalam Islam. Namun jika esensi politik sebagai usaha bagi kehidupan

yang baik, maka politik sangat penting bagi Islam dan masih ada relevansinya dengan Barat sekalipun didefinisikan dalam pengertiannya yang sempit sebagai seni memerintah. Perintah al-Qur'an agar kita mengajak kepada kebaikan dan menjauhi keburukan menjadikan Islam mempunyai tawaran yang tinggi dalam masalah politik. Eickelman (1996: 16) menyatakan:.

Politik Islam melibatkan kompetisi dan persaingan, baik mengenai penafsiran simbol-simbol maupun demi penguasaan atas institusi-institusi formal maupun informal, yang menyokong dan mendukung penafsiran itu. Penafsiran simbol-simbol dimainkan dengan latar belakang sebuah kerangka pokok yang dikontekstualisasikan dan didukung oleh hal-hal doktrin yang memberikan kontribusi pada kerangka yang akan dan telah dibangun terutama dalam bidang politik.

Dengan demikian menurut politik dalam Islam dapat dikatakan, bahwa politik adalah merupakan aspek yang paling banyak menghadapi tantangan pada era modern-kontemporer. Pada awal abad ke-19 sebenarnya modernitas telah masuk ke dalam dunia Islam, akan tetapi tidak mampu memberikan dinamika bagi umat Islam secara luas.

Dalam hal ini, Mesir yang berada dalam kekuasaan Perancis telah melahirkan dua tokoh yang dinilai "sekuler", keduanya dididik ala Barat dan banyak diilhami oleh pemikiran Barat. Dua tokoh itu ialah Ali Abd. Raziq dan Thoha Husein.

Dilihat dari perspektif politik, keadaan kontemporer tidak terlalu menguntungkan bagi umat Islam untuk mengembangkan nilai-nilai ajaran Islam. Lebih-lebih di bidang politik, ia akan dihalangi oleh proses sekulerisasi. Sekulerisasi menjadi bagian terpenting dalam menuju modernisasi, karena tanpa sekulerisasi tidak akan ada yang namanya modernisasi. Bahkan menurut Smith, pembangunan politik itu sendiri bermakna sekulerisasi politik, yaitu mengeluarkan agama secara progresif dari sistem politik.

## 2. Sistem Politik dalam Islam

Menurut Yusanto (1998: 75), sebelum mengkaji secara mendalam mengenai sistem politik dalam Islam, ada sebuah pertanyaan yang menarik yang berkenaan dengan masalah yang sekarang dikaji, yakni "Adakah sistem politik dalam Islam?"

Menyangkut hal ini, setidaknya ada tiga jawaban yang tentunya terkait erat dengan pengertian Islam itu sendiri sebagai agama. **Pendapat pertama**, antara lain didukung oleh al-Mawardi, al-Ghazali, Ibn Taimiyah (dari kalangan Salaf), Rasyid Ridla, Abul 'Ala al-Maududi, Taqiyuddin al-Nabhani, Sayyid Qutb dan Hassan al-Banna (dari kalangan ulama' mutaakhirin). Menurut mereka, sistem politik dalam Islam bukan saja ada, tapi sudah menjadi *ma'lumun min al-din bi al-dlarurah* (sesuatu yang sudah diketahui secara jelas dalam agama), sebagaimana telah diketahuinya kewajiban shalat, zakat, puasa, haji, jihad dan sebagainya.

Oleh karena itu mempertanyakan perlu tidaknya sistem politik dalam Islam sama seperti mempertanyakan perlu tidaknya makanan bagi manusia, yang mana ia sudah terlalu jelas. Bukan hanya adanya bahkan bentuk dan rincian sistem politik (pola kekuasaan, mekanisme suksesi, pertanggungjawaban penguasa, hak warga negara dan sebagainya) benar-benar telah ada dalam Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin, bahwa hal seperti itu sebenarnya sudah cukup jelas. Pertanyaan semacam ini, katanya, tidak pernah muncul di kalangan umat Islam hingga datang masa-masa kemunduran umat Islam pada dua abad terakhir, setidaknya sampai munculnya tokoh-tokoh semacam Thaha Husein dan Ali Abd al-Raziq, alumni Oxford University, Inggris dengan bukunya yang kontroversial *al-Islam wa al-Ushuluhu*.

Sifat kontroversial al-Raziq ini lebih dikarenakan pendapat-pendapatnya yang disampaikan dalam bukunya tersebut, yang pada akhirnya mengakibatkan Ali Abd al-Raziq diusir dari Universitas al-Azhar, Mesir

pada tahun 1925. Menurut pandangan Ali Abd al-Raziq, sebagaimana tertuang dalam bukunya itu, bahwa Islam sebagaimana agama dalam pengertian Barat tidak mempunyai sedikit pun doktrin tentang sistem politik. Baginya Islam adalah agama yang semata-mata hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Pandangan demikian ini merupakan representasi pendapat yang kedua. Dan pendapat yang ketiga, pada intinya menolak pendapat yang kedua tetapi juga tidak setuju dengan pendapat yang pertama. Baginya, Islam adalah agama yang lengkap dan paripurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk masalah politik bukan agama sebagaimana dimengerti Barat yang hanya sekedar mengatur kehidupan manusia dengan Tuhannya. Islam jelas mempunyai sistem politik. Hanya saja, ia sebatas memberikan garis-garis besar atau pokok-pokok dan substansi, sedang mekanismenya diserahkan kepada manusia sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

## 3. Prinsip--prinsip Politik Islam

Ada beberapa prinsip politik Islam yang berdasarkan pada ketetapan "Piagam Madinah"), yang pada saat itu Nabi Muhammad SAW berperan sebagai dasar hukum dan sekaligus konstitusi negara. Beberapa prinsip itu antara lain : Prinsip Ummat (QS. al-Baqarah/2: 213, Yunus/10: 19, al-Anbiya'/21: 92, al-Mu'minin/23: 52); Prinsip Persatuan dan Persaudaraan (QS. al-Qashash/28: 86, al-Anfal/8: 72,73,74, al-Hujurat/49: 10, Ali Imran/3: 103, al-Mumtahanat/60: 8); Prinsip Persamaan (QS. an-Nisa'/4: 1, al-Hujurat/49: 13); Prinsip kebebasan (dalam pasal 2 dan 3 dari Piagam Madinah); Prinsip Pertahanan (dalam pasal 24, 37, 38 dan 44 dari Piagam Madinah).

## 4. Pembentukan Pemerintahan dan Negara Islam

Dikatakan oleh Rais (1992: 36)t.

Ketika sistem kekhalifahan mengalami kemunduran (1924 di Turkey), dunia Islam mulai ramai membicarakan konsep negara

Islam. Selama penjajahan Barat atas dunia Islam, kaum muslimin tidak sempat dan tidak mampu berfikir tentang ajaran agama mereka secara jelas, komprehensif, tuntas mengenai berbagai masalah.

Dari keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk kurun yang cukup lama, kaum muslimin secara sengaja dipisahkan dari ajaran-ajaran Islam oleh Penjajah Barat, dan dalam proses aliansi masyarakat Islam dari agamanya. Secara intelektual kaum muslimin sangat lemah, oleh karenanya tidak mampu melakukan dialog yang seimbang dengan Barat. Impotensi intelektual ini secara langsung atau tidak disebabkan juga oleh hubungan kekuasaan yang amat senjang antara Barat dan dunia Islam. Kesenjangan ini berdampak negatif pada perkembangan dan pertumbuhan intelektual masyarakat Islam. Pada, gilirannya, masyarakat Islam akhirnya hanya menjadi konsumen ideologi Barat dan tidak dapat membaca khazanahnya sendiri (khazanah Islam).

Munawwar (2000 : 77) menyatakan, bahwa kajian tentang hubungan Islam dengan negara telah banyak dibahas yang antara lain oleh Alan Samson (1968, 1978), Deliar Noer (1980), Achmad Syaf'i Ma'arif (1983, 1985), Kontowijoyo (1991), Munir Mulkan (1992), Bakhtiar Efendi (1994) dan Douglas Ramage (1995).

Dari keterangan di atas ini terlihat ada semacam benang merah yang ditawarkan oleh beberapa intelektual Muslim tersebut yaitu Hubungan antara agama dan negara. Dalam Islam telah diberikan teladan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri setelah beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Dari nama yang dipilih oleh Nabikota tempat hijrahnya itu menunjukkan rencana beliau dalam rangka mengemban misi sucinya dari Tuhan, yaitu menciptakan masyarakat yang berbudaya tinggi yang kemudian menghasilkan entitas sosial politik yakni sebuah negara. Negara Madinah pimpinan Nabi itu, dikatakan Robert Bellah (seorang Ahli sosiologi terkemuka), sebagai model hubungan antara

agama dan negara (dalam Islam). Ide pokok eksperimen Negara Madinah ialah adanya suatu tatanan sosial-politik yang diperintah dengan bukan atas kemauan pribadi, tidak oleh prinsip-prinsip *ad hoc* yang dapat berubah-ubah sesuai dengan keinginan pemimpin, melainkan oleh prinsip yang dilembagakan dalam dokumen kesepakatan dasar semua anggota masyarakat yaitu sebuah konstitusi. Dokumen kesepakatan semua anggota masyarakat, yang oleh kebanyakan pakar politik Islam disebut sebagai konstitusi itu, diantara ketetapan-petapannya tidak ada yang menyebutkan bentuk negara, bentuk pemerintahan, struktur kekuasaan, perangkat birokrasi, sebagai lazimnya sebuah konstitusi.

### **Perbandingan Konsep Politik Machiavelli dan Islam**

Ada perbedaan mendasar antara konsep politik Machiavelli dengan konsep politik Islam. Perbedaan ini berpangkal dari cara pandang yang berbeda. Di sini akan dianalisa secara detail perbedaan keduanya dengan pisau analisis isi, antara lain:

Perbedaan pertama, adalah menyangkut bentuk Negara. Machiavelli lebih member apresiasi bentuk Negara kerajaan, dengan alasan bahwa bentuk negara kerajaan akan dapat melanggengkan kekuasaan sehingga dapat menciptakan sebuah negara yang secara turun temurun dipegang oleh sebuah dinasti yang sangat kuat dan kokoh. Sedangkan politik Islam, sebagai direpresentasikan oleh al-Mawardi, lebih meangapresiasi bentuk negara teokrasi (negara yang berketuhanan, negara yang menganut sistem syari'at Islam).

Perbedaan kedua, yang sangat kentara dari konsep Machiavelli adalah ia sering menggunakan kata "menumpas habis" penguasa lama; kata "tumpas habis" bersinonim dengan libas, ganyang dan pembumi-hangusan. Artinya, Machiavelli memandang bahwa yang sangat membahayakan kekuasaan pemerintah yang sedang berkuasa adalah kekuatan penguasa lama dengan pendukung setianya; oleh

karena itu dalam pandangan Machiavellimereka itu harus dihabisi hingga seluruh keturunannya (L. Passerini, 1998: 97). Sementara dalam konsep politik Islam tak dikenal istilah tumpas-habis, yang ada adalah *qishas* (menghukum pembunuh dengan balasan setimpal); kata *qishas* digunakan dalam kosa kata Islam ketika bersentuhan dengan tindak penganiayaan, pengrusakan dan lainnya. *Qishas* dilaksanakan ketika masyarakat melanggar ketentuan *maqashid al-khamsah al-syar'iyah* (5 kaidah syariat): *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), *al-mal* (harta benda), *al-nasl* (keturunan), *al-'aql* (akal), *al-'irdli* (kehormatan), dan *hifzh al-jaah* (memelihara keselamatan jabatan).

Perbedaan ketiga, antara konsep politik Machiavelli dengan Islam adalah mengenai "invasi negara lain." Bagi Machiavelli, invasi ke negara lain harus dengan pertimbangan perluasan negara danantisipasi penyerangan terhadap kekuasaan raja atau penguasa. Kata invasi sering diintroduksi Machiavelli ketika membahas strategi mempertahankan kekuasaan. Sementara konsep syariat Islam lebih memfokuskan penguatan basis internal negara sendiri tanpa mengganggu ketenangan negara lain, terutama negara tetangga. Kecuali ada penyerangan dari negara lain maka fatwa resolusi jihad akan ditegakkan dan dilaksanakan. Maka dari itu ketika syariat Islam melihat status orang kafir dalam kitab fiqh diklasifikasikan atas: *kafir dzimmi* (orang kafir yang bersedia hidup berdampingan dengan orang muslim dengan perjanjian yang telah disepakati bersama). *Kedua: kafir harbi* (orang kafir yang tidak mau melakukan perjanjian dan kepakatan perdamaian dengan orang Islam dan ada usaha menyerang orang Islam baik secara terangterangan maupun secara sembunyi).

Perbedaan yang keempat, adalah menyangkut masalah pertahanan di daerah koloni atau taklukan. Bagi Niccollo Machiavelli, pertahanan di daerah taklukan itu amat penting karena apabila negara

koloni itu tidak dikendalikan oleh penguasa pusat, maka dikhawatirkan akan terjadi serangan balik darinya. Yakni bisa dengan cara menempatkan orang-orang dari pusat atau menunjuk orang-orang pribumi yang setia kepada pemerintah pusat di daerah koloni tersebut. Sementara konsep politik Islam menyangkut negara penyerang, dan kemudian tentara Islam berhasil menaklukkannya, maka penguasa daerah koloni itu tetap dihormati dan bahkan diizinkan untuk tetap berkuasa, tentu dengan sejumlah persyaratan. Hal semacam ini telah biasa dilakukan oleh Nabi SAW, yakni terutama ketika beliau melakukan penyerangan ke Mekkah yang dalam sejarah dikenal dengan sebutan *Fathu Makkah*.

Perbedaan kelima, mengenai figure seorang pemimpin. Menurut Niccollo Machiavelli bahwa figur seorang pemimpin yang disegani oleh rakyat adalah orang yang kuat dan licik, karenanya Machiavelli sering sekali mengintroduksi kosa kata "kuat" dan "licik" itu ketika membahas tentang strategi merebut kekuasaan. Sedangkan menurut konsep politik Islam, profil atau figure pemimpin yang disegani oleh rakyat adalah pemimpin yang dapat mentauladani atau mencontoh model kepemimpinan nabi Muhammad SAW dengan empat sifat utamanya: *shiddiq* (jujur), *tablig* (pemyampaian dengan tutur kata yang baik), *amanah* (dapat dipercaya) dan *fathonah* (cerdas).

Perbedaan keenam, adalah menyangkut masalah kebebasan. Menurut Niccollo Machiavelli, seorang penguasa mempunyai kebebasan yang tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh aturan atau undang-undang, karena aturan atau undang-undang itu adalah merupakan buatan penguasa sendiri. Oleh karena itu, setiap ada amandemen terhadap aturan atau undang-undang maka penguasalah yang berhak mengaturnya, dengan tanpa ada pihak-pihak yang bisa menghalanginya. Penguasa dan rakyat berbeda secara diametral: kebebasan raja bersifat tidak terbatas, sedangkan rakyat wajib mentaati peraturan yang telah

ditetapkan penguasa. Sementara di dalam politik Islam, semua orang sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an mempunyai kebebasan yang sama, tentu dengan adanya sejumlah batasan-batasan. Selain itu, semua orang mempunyai hak yang sama, manusia mempunyai sifat *zone politicon* (selalu membutuhkan orang lain) tidak akan mempunyai kebebasan yang langgeng, karena antara manusia yang satu dengan yang lain saling membutuhkan, yang pada akhirnya semua orang tidak akan mempunyai kebebasan yang mutlak karena konsekuensi logis dari adanya interaksi antar manusia ini akan melahirkan konsensus-konsensus yang bersifat mengikat. (A.E Priyono, 1990: 320)

### KESIMPULAN

Berdasarkan pada bahasan yang diuraikan di atas dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Paradigma politik tawaran Niccollo Machiavelli sebenarnya tidak seharusnya dilaksanakan, tetapi hal itu memang telah terjadi dan dilakukan oleh sejumlah penguasa. Bentuk negara yang ia kehendaki adalah yang benar-benar bisa menyatukan rakyat Italia. Adapun strategi mempertahankan negara yang menjadi prioritas konsepnya adalah membangun kekuatan tentara rakyat yang mempunyai semangat patriotisme yang tinggi. Strategi merebut dan atau mencapai suatu kekuasaan yang ia tawarkan adalah dengan mengedepankan kemampuan dan dukungan rakyat.
2. Menyangkut sistem politik di dalam Islam, setidaknya terdapat tiga pandangan. Pertama, sistem politik Islam itu benar-benar ada, bersifat jelas dan lengkap. Kedua, dalam Islam tidak dikenal sama sekali sistem politik; Islam hanya mengatur hubungan yang bersifat vertikal yakni hubungan antara makhluk dengan Tuhan. Ketiga, sistem politik dalam Islam memang benar-benar ada, hanya saja menyangkut mekanisme dan

rincian serta bentuk operasionalnya diserahkan sepenuhnya kepada kreasi dan ijtihad manusia. Prinsip-prinsip politik dalam Islam disesuaikan dengan rancangan pasal-pasal yang telah tercantum di dalam ketetapan Piagam Madinah, yaitu: prinsip ummat, persatuan dan persaudaraan, persamaan, kebebasan, pertahanan negara dan lain sebagainya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Fuad M. 1367 H. *Mufahras li Alfadz al-Qur'an*. Surabaya: Maktabah Dahlan.
- Abdurrozak, Wasiq. 1990. *Islam di Persimpangan Paham Modern*. terjemah dari edisi Arab *Harakat wa Madzahib fi Mizan al-Islam* oleh Fathi Yakan. Cet. 2. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al Munawwar, Said Agil Hussein. 2001. *Dimensi-Dimensi Kehidupan dalam Prespektif Islam*, Malang: Pasca Sarjana Universitas Islam Malang (UNISMA).
- Al-Mawardi, Abi Hasan Ali Ibn Muhammad Habib al-Bashri al-Baghdadi, 1966. *Kitab al-Ahkam al-Sulthanyiah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin. 1996. *Sistem Pemerintahan Islam dan Realitas. Doktrin serta Sejarah Empirik*. Cet. 1. Bangil: al-Izzah Press.
- Al-Qurthubi. 1951. *al-Jam' li Ahkam al-Qur'an*. Vol. 4. Lahore: Idarat Tarjamah al-Qur'an.
- Arikunto, Suharsini. 1992. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. Ke-VIII, Jakarta: Rineka Cipta.

- Asshiddieqi, Hasbi. 1987. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Cetakan ke-11. Semarang: Pustaka Rizqi Putra.
- Azhar, Muhammad. 1996. *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azhar, Muhammad (1997), *Filsafat Politik Perbandingan antara Islam dan Barat*, Cet.2 Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barson, Margaret S. et. al. 1999. *Belajar Civic Education dari Amerika*. Yogyakarta: LKiS.
- Benedanto, Pax. 1999. *Politik Kekuasaan Menurut Niccolo Machiavelli*. Cet.2. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Berkhoff dan Enklaar, t. th. *Sejarah Gereja*. Jakarta: BPK Press.
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. XXI. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dhiyauddin Umar, Akram. 1999. *Masyarakat Madani, Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi*. Cet. Ke-1. Jakarta: Gema Insani Press.
- Effendy, Ady A. 1999. *Dekonstruksi Islam Madzhab Ciputat*. Cet. 1. Bandung: Zaman Wacana Mulia Press.
- Eickelman, Dale F, dan James Piscatori. 1998. *Ekspresi Politik Muslim*, Cet. 1. Bandung: Mizan.
- Farid Mas'udi, Masdar. 2001. *Demokratisasi dan Demiliterisasi Wacana dan Pergulatan di Pesantren*. Cet 1. Jakarta: P3M.
- Flkri AF, Ahmad. Et. al. 1999. *Menjadi Politisi Ekstra Parlementer*. Yogyakarta: LKiS.
- Halim, Abd. 1991. *Indonesia Berjuang*, Jember: MAN Jember Press.
- Hikmat, Asep. 1995. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, terjemahan dari The Islamic Law And Constitution*, oleh : Abul A'la al.Maududi, Cet.4, Bandung: Mizan.
- Jamaduddin Malik, Dedy 1988. *Zaman Baru Islam Indonesia (Pemikiran dan Aksi Politik)*. Bandung: Zaman Wacana Mulia Press.
- Juergensmeyer, Mark. 1998.. *Menentang Negara Sekuler (Kebangkitan Global Nasionalisme Relegius)*. Cet I. Bandung: Mizan.
- Karim, Rusli M. 1997. *Hlvff -WO Dalam Kemelut Modernisasi Politik di Indonesia*. Cet I Bandung: Mizan .
- Koentjaraningrat. 1980.. *Mehode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarata: Gramedia.
- Kuntowijoyo. 1997. *Identitas Politik Umat Islam*, Cet. 2. Bandung: Mizan.
- Latif, Yudi et.al. 1996. *Bahasa dan Kekuasaan (Politik Wacana di Panggung Orde Baru)*. Cet.1 Bandung: Mizan.